

# Hidup Bernegara Mewujudkan Kondisi Hormat Atas Martabat Manusia

Sunarto NDARU MURSITO \*

Pembangunan nasional kita meliputi berbagai aspek kehidupan bernegara, di antaranya pembangunan politik melalui pendidikan politik. Dalam pendidikan politik ini ditampilkan kesadaran berbangsa dan bernegara di antara rakyat, supaya dengan ini digerakkan rasa *solidaritas dan tanggung jawab sosialnya* untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Sebab kalau seorang warga tak memiliki rasa kebersamaan atau kebangsaan dengan sesamanya, mana mungkin ia mempunyai solidaritas dengan sesama warga. Juga kalau tidak mengetahui tujuan negaranya yang disetujuinya, wajarlah jika dia pun tidak melibatkan diri (bertanggung jawab) dalam pembangunan negaranya.

Tulisan ini bermaksud membahas kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara yang setiap orang mau tak mau sekarang mengalaminya. Namun pemikiran masyarakat dan negara ini diorientasikan pada perwujudan *nilai hormat* atas martabat kemanusiaan segenap warganya, supaya setiap warga disadarkan berkepentingan dan merasa memiliki masyarakat ataupun negara itu. Dan oleh karenanya dikembangkan semangat solidaritas maupun tanggung jawab sosial mereka demi kemajuan masyarakat dan negara.

Ciri dasariah hidup manusia ialah berkembang terus-menerus. Manusia diciptakan sebagai potensi yang harus menjadi realisasi atau bakat yang berproses menjadi perwujudan. Proses seseorang berkembang menuju suatu "ideal" kemanusiaannya itu terlaksana secara sosial, yaitu hidup dan berkembang bersama-sama dengan orang lain dalam masyarakat maupun negara. Dapat dikemukakan bahwa memang hakikat manusia itu sendiri membutuhkan adanya masyarakat dan negara.

\*Staf CSIS.

## KEHIDUPAN MANUSIA MEMBUTUHKAN MASYARAKAT

Secara individual saja manusia mengalami ketidakmampuan untuk mencukupi dirinya sendiri. Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dan beragam keinginannya secara sendirian, bahkan dalam kebutuhan dasar sekalipun seperti kebutuhan material: pangan, pakaian, perumahan ataupun kebutuhan non-material: pengetahuan, rasa hormat, hubungan personal (berteman). Maka setiap manusia perlu saling membantu dan melengkapi dengan manusia lain, sebab mereka saling membutuhkan satu sama lain.

Ternyata pula hal-hal yang dibutuhkan hidup manusia itu pun tidak terdapat secara berlimpah. Manusia menemui kelangkaan barang dan jasa kebutuhan hidupnya. Karenanya kebutuhan hidup perlu diusahakan bersama-sama orang lain, apalagi jika kebutuhan ini mesti diolah terlebih dahulu oleh banyak penanganan. Keperluan "survival" bagaimanapun menuntut adanya kelangsungan suatu masyarakat, terlebih lagi bila manusia hendak mewujudkan keinginannya yang bervariasi.

Secara sendirian saja sangat terasakan sifat keterbatasan manusia, misalnya, dalam hal pengertian, ketrampilan, dan tenaga. Dalam hal akal budi yang dianggap merupakan kehebatan manusia di atas semua makhluk lain harus diakui, bahwa pengetahuan perorangan itu terbatas. Atas akibat atau hasil dari tindakannya sendiri orang tidak selalu jelas. Penekanan keterbatasan manusia perorangan ini tidak berarti mengecilkan prestasi manusia. Ini hanya menegaskan bahwa prestasi-prestasi gemilang yang telah dicapai manusia itu ternyata merupakan hasil kerjasama antar manusia.

Seorang diri saja manusia adalah makhluk rawan dan perlu perlindungan. Bersama-sama dengan orang lain dalam masyarakat, manusia pada umumnya dapat mempunyai "kemampuan manusiawi" yang hampir sama. Banyak orang mencapai kemampuan menonjol: memiliki kepandaian intelektual, kecakapan mencari teman atau memperoleh pengaruh, keunggulan jasmani, dan seterusnya. Kendatipun semua itu, rupanya adalah tepat untuk menyatakan bahwa tak seorang pun mungkin demikian superior di atas orang lain, sehingga tak akan ada orang lain yang tak dapat melebihi dia. Secara kasarnya, orang yang paling kuat pun harus tidur, dan pada saat itulah ia dapat dipukul kepalanya. Jelaslah setiap orang mempunyai kelemahan dan dapat mengupayakan kelebihanannya masing-masing.

Meskipun bersifat terbatas, namun setiap manusia dari segi emosional atau moral mempunyai kebaikan atau kemurahan hati. Wajarlah bila manusia berbuat untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kadang-kadang ia ingin menolong orang lain dan berbelaskasih kepada orang yang sedang malang, kalau ka-

renanya tidak menghadapi kesukaran atau dengan itu ia yakin bahwa nanti akan menerima balasan baik juga. Secara biologis saja manusia merupakan makhluk yang berkelompok, di mana masing-masing menjadi dewasa di dalam kehidupan keluarga. Dalam berhubungan dengan orang lain, seseorang akan bersikap memihak kepada keluarga atau kelompoknya.

Dari segi kejiwaannya manusia pun terbuka kepada orang lain, misalnya terungkap dalam perilaku tertawa, berbicara (bahasa), kasih sayang yang membutuhkan lingkungan sosial untuk pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi jiwa manusia memang memerlukan kontak dan kebersamaan dengan orang lain. Sudah tentu pula tanpa sosialitas, maka tak bernilaiilah uang seseorang, kehormatannya, dan lain-lain.

## KEHIDUPAN BERMASYARAKAT MENUNTUT ADANYA NEGARA

Dari kenyataan itu semua menjadi jelas bahwa manusia tidak dapat hidup dan berkembang, jikalau tanpa hidup dan berkembang bersama dengan orang lain secara *bermasyarakat*, karena hakikat kodrati manusia adalah menjadi individu pribadi yang bersifat sosial. Di samping itu, kondisi kelangsungan kemasyarakatan manusia ini menuntut adanya kehidupan *bernegara* di mana orang perorang menjadi warganya, sebab negara diperlukan untuk fungsi-fungsi:

### Mengusahakan Keadaan Aman dan Tenteram

Bidang keamanan merupakan tugas negara yang amat penting, karena keadaan tak aman menyebabkan berlangsungnya rasa ketakutan, keresahan, ketidakmantapan, dan bahkan permusuhan. Kondisi seperti ini niscaya akan membuat kegiatan-kegiatan yang baik serta konstruktif dari para warga menjadi terhambat atau sama sekali tidak mungkin. Akibatnya, masing-masing warga banyak dirugikan dan masyarakat secara keseluruhan pun sukar membangun. Bahaya yang mengganggu keamanan ini bisa terjadi di mana pun di seantero negeri. Untuk menghadapi itu dibutuhkan lembaga kemasyarakatan yang bersifat *inklusif*, yaitu yang dengan sendirinya membawahi semua warga, dan memiliki *kekuasaan* karena gangguan keamanan sering kali baru teratasi dengan kekuasaan berupa penggunaan kekerasan.

Lembaga kemasyarakatan yang inklusif dan berkuasa demikian itu adalah negara. Tanpa penyelenggaraan keamanan oleh negara ini, pasti usaha perorang atau masyarakat untuk memelihara kehidupannya yang aman dan tenteram akan sulit berhasil. Jelas gangguan keamanan yang terus-menerus,

apalagi ancaman kekerasan yang ada, hanya dapat ditanggulangi melalui kekuatan yang paling unggul. Dan negaralah merupakan satuan sosial terbesar yang memiliki kekuatan demikian demi melindungi keamanan hidup warganya maupun menjauhkan rasa takut yang mengganggu.

### **Mengadakan Aturan Pasti Bagi Kelakuan Warga**

Supaya dapat terselenggara kehidupan aman, keselarasan sosial, dan kerjasama dalam hidup bermasyarakat dipersyaratkan adanya aturan pasti bagi kelakuan umum di antara manusia dengan sesamanya. Negara bertugas untuk mengadakan dan memelihara aturan pasti atau *tata hukum*. Susunan kelakuan berpola atau tata hukum ini berupa hukum pidana (hukum kriminal), hukum perdata (hukum sipil), dan hukum tata negara. Tata hukum yang menyelenggarakan tertib keteraturan masyarakat ini menetapkan warga negara dapat secara legitim menuntut perlindungan dari negara dan perilakunya dimungkinkan menjadi efektif.

### **Memberikan Penyelesaian Atas Perselisihan yang Muncul**

Kehidupan bermasyarakat terdiri dari banyak warga yang mempunyai aneka ragam kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan bertentangan. Sebagai contoh konsumen menghendaki harga barang yang murah, sebaliknya produsen menghendaki untung yang sebesar-besarnya; pemilik industri lebih senang langsung membuang limbah pabriknya ke pantai, yang ternyata hal ini sangat mengganggu kepentingan para nelayan dan wisatawan; begitu pula petani berselisih dengan pengusaha real estate mengenai pembebasan tanah; dan seterusnya.

Beragamnya kepentingan warga masyarakat itu mengakibatkan proses sosial di mana dapat berlangsung persaingan, perselisihan, atau pertentangan di antara perorangan atau kelompok. Hal ini mudah terjadi dalam permasalahan dari yang sepele sampai kepada yang kompleks. Untuk memecahkan berbagai keadaan yang demikian itu dibutuhkan adanya negara menjadi *wasit yang netral* guna menyelesaikan perselisihan warganya yang dari waktu ke waktu selalu dapat muncul.

### **Mengupayakan Pemerataan Pendapatan/Keadilan**

Negara mampu berperan besar pemeratakan tingkat pendapatan di antara warga-warganya dengan mencampuri proses kehidupan ekonomi masyarakat



dan melindungi golongan ekonomi lemah. Dia dapat mengatur industri, perdagangan, penggunaan keuangan negara, dan lain-lain mengarah keuntungan segenap warganya seperti melalui kebijakan perpajakan progresif, subsidi, proteksi, teknologi padat karya.

Berprosesnya pemerataan pendapatan ini sangat penting demi keadilan dan kehormatan martabat setiap warganya. Sebab biarpun resmi diakui ada kebebasan politik ataupun kesamaan hukum untuk semua warganya, biasanya takkan ada *kebebasan dan kesamaan yang nyata*, selama pendapatan di antara warga mengalami kesenjangan besar dan kekuatan ekonomi secara bebas digunakan untuk mengatur segalanya demi kepentingan mereka yang kaya dan kuasa.

### **Menyelenggarakan Kemajuan dan Kesejahteraan Sosial**

Supaya kemajuan dan kesejahteraan sosial pada segenap warga senantiasa terjamin, diperlukan peranan negara sebagai penanggung jawab yang efektif untuk mengurus bidang pendidikan, kesehatan, jalan dan perhubungan (komunikasi).

- a. Tanpa usaha negara mungkin sekali sebagian anak tidak memperoleh pendidikan sama sekali: yatim piatu, anak cacat, kelompok miskin dan ter-pencil, sehingga bisa tercipta kesenjangan sangat besar dalam perkembangan kualitas manusiawi para warga. Jelas pendidikan mempunyai suatu kepentingan nasional yang sungguh-sungguh, misalnya demi pembinaan kesadaran nasional, di mana negara dituntut mengemban peran untuk melestarikan kelangsungan bangsa dan semakin meningkatkan kualitasnya.
- b. Kesehatan perseorangan akan dibahayakan, jika lingkungan sosial dan alam tidak diusahakan untuk menunjangnya. Untuk itu dituntut perawatan serta pemisahan orang-orang yang menularkan penyakit dan pemeliharaan kebersihan semua kebutuhan hidup seperti air, udara, dan lingkungan perumahan. Dalam urusan kesehatan ini yang dipertaruhkan adalah keselamatan seluruh warga, maka sudah sepatutnya negara mengemban tugas yang vital untuk kesejahteraan warganya ini demi kelangsungan negara itu sendiri.
- c. Supaya kesosialan manusia benar-benar terwujud sebaik-baiknya, setiap warga sewajarnya dimungkinkan untuk *saling berhubungan satu sama lain*. Maka diperlukan adanya jaringan jalan, transportasi, telekomunikasi, media-komunikasi. Pengurusan negara dalam bidang ini dapat menghilangkan ketaklancaran dan kekacauan, misalnya dalam hal jaringan jalan

atau media komunikasi, di samping mencegah adanya bagian wilayah tertentu dilalaikan.

Kesemua fungsi di atas merupakan daya upaya negara untuk menciptakan *kesejahteraan umum* bagi segenap warganya. Mudah dipahami betapa penting dan bahkan mutlak nya arti lembaga negara ini bagi kepentingan hidup manusia. Bagaimanapun kesejahteraan umum hanya dapat dijamin oleh negara sebagai lembaga yang bersifat inklusif dan berkekuasaan dengan kekuatan tak terlawan, selain itu berkemampuan mengusahakan sarana-sarana dan sumber dana yang *tak mungkin dilaksanakan* oleh perseorangan atau kelompok. Namun demikian, harus diakui juga bahwa ada aspek-aspek kehidupan manusiawi yang tak mungkin terpenuhi, kalau hanya mengandalkan pengelolaan negara.

## KEHIDUPAN MANUSIAWI MEMERLUKAN ORGANISASI SWADAYA DAN TERPADU

Ada pemikiran yang berpandangan bahwa negaralah merupakan satu-satunya organisasi sosial yang diperlukan oleh kodrat moral dan psikologis manusia. Ini berarti bahwa berbagai macam organisasi sosial lain baik yang berupa perhimpunan, perkelompokan, ataupun persekutuan tidak diakui adanya. Dinyatakan sebagai alasannya ialah secara moral adanya bermacam-macam organisasi sosial di samping negara akan menyebabkan berlangsungnya konflik kewajiban yang takkan ada pemecahannya. Selain itu, secara psikologis hal ini menyebabkan persaingan kesetiaan pada warga negara yang termasuk keanggotaan bermacam-macam organisasi, sehingga membuat kehidupan yang aman dan bahagia tidak mungkin.

Akan tetapi pandangan itu mengingkari kenyataan sosialitas kodrati manusia yang bersifat kooperatif (bekerjasama). Dalam hal ini lembaga negara dialami sebagai terlalu besar untuk masing-masing pribadi warganya, yang secara alamiah merasa dipersatukan dalam ikatan simpati dan keinginan bekerjasama dengan sesama warga yang lebih dekat. Apalagi kepentingan-kepentingan pribadi perorangan terlalu rumit untuk secara wajar diwujudkan dalam satu organisasi tunggal yaitu negara saja. Wadah perwujudan simpati dan kerjasama dapat lebih alamiah terlaksana dalam organisasi-organisasi selain negara, yaitu dalam satuan-satuan sosial kecil dan non-politis seperti keluarga, perusahaan, perkumpulan.

Namun ada pula pemikiran yang berpandangan untuk menerima berbagai jenis organisasi tetapi mengakuinya sebagai *bagian dari peralatan* negara, yaitu difungsikan untuk memenuhi kebutuhan negara dan menuruti pejabat-

nya dalam segala hal. Organisasi-organisasi sosial demikian ini merupakan cita-cita negara totaliter yang menuntut kepatuhan pada pengelolaan negara dalam segala bidang, karena secara ini dipikirkan bahwa kehidupan bernegara akan mampu menciptakan suatu organisasi kesejahteraan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian negara dirancang menguasai serta mendikte semua persekutuan, perhimpunan, atau perkelompokan yang ada di negara itu. Menghadapi berbagai kepentingan hidup menusiawi, maka negara akan mencoba menyerap, berkompromi, dan menemukan ketidaklengkapannya. Memang semakin suatu perhimpunan mengejar tujuan ekonomi murni, semakin mudah peranannya diambil alih oleh negara. Negara yang berpretensi menjadi organisasi pengurus sampai menyangkut segi-segi rohani kemanusiaan, pengurusannya akan diperlemah sampai ke akar-akarnya, sebab masing-masing wargalah yang lebih kompeten menangani urusan pribadi dan rohaninya.

Terhadap pandangan yang terlalu melebih-lebihkan tugas negara itu, sebaliknya timbul pemikiran untuk mengadakan, memandirikan, dan menggiatkan berbagai jenis organisasi sosial sejauh fungsional untuk kepentingan warga negara. Semua organisasi ini harus bebas, berdiri sendiri, dan bersama-sama mengurus seluruh kepentingan manusia dan menampung kesetiiaannya. Sebagai reaksi atas sikap pemutlakan negara, pandangan ini betul-betul berhasil. Namun pluralisme liberal dari keseluruhan organisasi sosial ini akhirnya tak akan jalan, jikalau menimbulkan persaingan tak sehat, pertentangan, kekacauan, dan anarkhi.

Karena negara itu pada hakikatnya untuk mengorganisasi kehidupan bermasyarakat demi kesejahteraan umum segenap warganya, maka negara *bukan merupakan tujuan* melainkan *hanya sarana* bagi kepentingan warga-warganya. Negara hanya berfungsi membantu atau mengabdikan seluruh warganya untuk mencapai apa yang tidak mungkin diwujudkan oleh usaha atau kerjasama perorangan maupun kelompok. Inilah yang dicita-citakan oleh *asas subsidiaritas*. Subsidiaritas merupakan asas yang pada pokoknya menentukan agar satuan sosial yang lebih besar jangan mengambil alih apa yang dapat dilaksanakan oleh satuan sosial yang lebih kecil.

Asas subsidiaritas berlaku bagi kelompok terhadap warganya, kelompok besar terhadap kelompok kecil anggotanya, dan negara terhadap warga negara ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Sebagai dasar moral kaidah ini adalah menghormati *inisiatif atau kegiatan dari bawah* dan mendorong *gairah hidup*. Di belakangnya terdapat pengakuan atas otonomi atau kebebasan manusia. Ini wajib diperhatikan, karena mengambil tugas yang dapat dilak-

sanakan oleh inisiatif dan kegiatan dari bawah berarti merebut, membatasi, dan mematikan otonomi dan tanggung jawabnya. Subsidiaritas hendaknya mengusahakan berbagai organisasi sosial dalam negara menjadi *organisasi swadaya* yang mempunyai kebebasan dan daya cipta dalam rangka mencapai masyarakat atau negara yang maju dan sejahtera.

Tercapainya tujuan masyarakat dan negara jelas tergantung pada keterlibatan aktif semua warga ataupun kelompok dalam persatuan sebagai suatu keseluruhan. Tanpa persatuan keterlibatan menjadi *keterpaduan aktivitas* yang menyeluruh ini, tujuan masyarakat dan negara sukar atau bahkan mustahil tercapai. Kesatupaduan aktivitas ini mempersyaratkan *asas solidaritas*. Semangat solidaritas mendorong setiap warga maupun kelompok mau melibatkan diri dalam kerjasama membangun masyarakat dan negara sebagai suatu keutuhan. Untuk itu warga maupun kelompok tidak cukup hanya menyempitkan tanggung jawab atas urusan atau peranannya sendiri, melainkan juga perlu meluaskan tanggung jawabnya atas kemajuan atau kesejahteraan bersama seluruh masyarakat dan negara.

Solidaritas ini dimaksudkan menjadi *solidaritas moral* dan bukan hanya *solidaritas sosiologis* yang berdasarkan kelembagaan sosial seperti adat, serikat sekerja, agama. Solidaritas sosiologis berkecenderungan menampilkan kotak-kotak antara warga, kelompok, dan kelas masyarakat sehingga seringkali menimbulkan bentuk *egoisme kolektif*. Sebaliknya solidaritas moral meluaskan solidaritas tertutup itu, karena menjiwai warga-warga dan kelompok-kelompok untuk terbuka dan menghayati bahwa isi hak-hak warga dan kelompok masing-masing tidak diartikan secara terlepas dari yang lain. Arah tanggung jawab adalah *kesejahteraan bersama* sebagai tujuan, di mana warga dan kelompok tidak dapat bertindak secara baik, kecuali dengan *menyesuaikan* kepentingan dan kegiatannya pada kesejahteraan bersama.

## ARAH PENGHORMATAN MARTABAT MANUSIA

Hidup bermasyarakat dan bernegara demikian itu dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang menghormati martabat manusia. Menurut Emmanuel Kant (1724-1804), martabat manusia adalah keluhuran manusia sebagai *seorang pribadi*, yakni suatu nilai pada dirinya sendiri atau juga suatu tujuan untuk dirinya sendiri. Martabat ini memang merupakan keluhuran manusia, karena derajat manusia sesungguhnya tidak sama dengan makhluk-makhluk duniawi lainnya. Semua ciptaan lebih rendah daripada manusia dapat dikatakan hanya mempunyai derajat sebagai *alat/kegunaan*, yaitu suatu nilai demi makhluk lain atau suatu tujuan untuk kepentingan ciptaan yang lain.



Setiap manusia tanpa kecuali sebagai pribadi, masing-masing dalam hidupnya mempunyai tugas dan panggilan tertentu. Demi menunaikan tugas dan panggilan itu pribadi manusia dilengkapi dengan kemampuan cipta (akal budi), karsa (kehendak), dan rasa (hati nurani). Dengan akal budinya manusia mampu mengetahui, berpikir, dan berkreaitivitas. Dengan kehendaknya manusia mampu sendiri menentukan, bertanggung jawab, dan bercinta kasih. Dan dengan hati nuraninya manusia mampu menyadari, mempertimbangkan, dan berintuisi. Kemampuan-kemampuan luhur manusia ini benar-benar tampil sebagai sumber daya adalah dalam *berinteraksi antar pribadi* dengan manusia lain.

Kepribadian manusia itu hanya bisa hidup dan berkembang, jikalau hidup dan berkembang dalam kebersamaan dengan manusia-manusia lain yang juga merupakan pribadi. Artinya, pribadi manusia ini secara hakiki bersifat sosial, di mana tugas dan panggilan hidupnya pun baru bisa terpenuhi dalam saling membantu dan bekerjasama dengan sesamanya manusia. Kesemua pribadi manusia itu pada dasarnya mempunyai tugas dan panggilan hidup untuk mengejar kesempurnaan dan kesejahteraan pribadinya *dalam pembangunan* kemajuan (kesempurnaan) dan kesejahteraan *bersama/umum* masyarakat.

Mengingat manusia itu bukan sekedar alat melainkan pribadi yang mempunyai tujuan hidup pada dirinya masing-masing, maka melanggar martabatnyalah jika dia sampai diperlakukan sebagai alat semata-mata seperti sembarang makhluk duniawi lainnya. Oleh sebab itu, kehidupan bermasyarakat dan bernegara sewajarnya membudidayakan etika yang mencegah warganya memeralat warga lainnya dan mengusahakan warganya mempribadikan warga lainnya. Masing-masing warga *mempribadikan* warga lainnya, jikalau memperlakukannya sebagai tujuan kesempurnaan dan kesejahteraan sehingga *warga lain itu* disempurnakan dan disejahterakan. Ini bertentangan dengan semangat egoisme yang memperlakukan orang lain hanya sebagai alat untuk mencari kemajuan dan kesejahteraan *akunya* semata-mata, bahkan meskipun berakibat menghambat perkembangan dan menyengsarakan orang lain itu.

Karena panggilan dan tugas hidup manusia adalah mengejar kesempurnaan dan kesejahteraan pribadinya dalam kerangka kesempurnaan dan kesejahteraan bersama dengan manusia-manusia lain, maka seseorang pada dasarnya merupakan *subyek kesempurnaan dan kesejahteraan* di tengah-tengah manusia lainnya yang merupakan sesama subyek kesempurnaan dan kesejahteraan pula. Hal ini sesuai dengan ciri kodrati bahwa derajat kemanusiaan dipercayakan untuk mandiri sebagai *pelaku yang aktif* atau subyek, yaitu manusia bersifat merdeka atau bebas: artinya dia *dapat memilih* perbuatan atau kelakuan untuk mencapai kesempurnaan atau kesejahteraan itu.

## SOLIDARITAS DAN SUBSIDIARITAS MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan menyelenggarakan kesempurnaan dan kesejahteraan pribadi semua warganya itu baru memungkinkan warga-warganya berpartisipasi dan bekerjasama terpadu membangun kemajuan dan kesejahteraan umum/bersama, kalau dapat mengembangkan asas solidaritas dan subsidiaritas dalam kegiatan-kegiatan pembangunannya. Dalam hal ini solidaritas memadukan keterlibatan dan kerjasama, sedangkan subsidiaritas mendorong kegiatan dan tanggung jawab semua/umum.

Istilah "solidaritas" berasal dari bahasa Latin "solidus" yang berarti padat, kompak, kuat. Dari sinilah bermula kata Perancis "solidaire" yang diambil bahasa Indonesia "solider" yaitu berarti bersama-sama, setia kawan, dan merasa senasib. Maka adanya semangat solidaritas dalam kehidupan bernegara membuat para warga dipersatukan demi mengejar secara bersama-sama tujuan negara. Sebab para warga negara itu sebenarnya sama-sama berkepentingan dengan pembangunan bersama, sewajarnya mereka pun dipadukan dalam kehendak dan perbuatan mewujudkan kepentingan itu.

Sebagai pribadi sosial menurut kodratnya untuk berkembang sebaik-baiknya manusia memerlukan negara yang bermasyarakat manusiawi. Karena keadaan masyarakat bagaimanapun merupakan hasil dari kegiatan seluruh warganya, demi solidaritas selayaknya setiap warga negara mau menyumbang membangun negaranya agar bermasyarakat semakin manusiawi. Untuk itu pentinglah warga negara mengetahui hidup sosial (masyarakat dan negara) yang seluas-luasnya, menghayati tujuan bersamanya, dan supaya bisa terlibat dalam pembangunannya. Namun solidaritas pula mempersyaratkan, agar kebijakan pembangunan yang dilancarkan oleh negara sejauh mungkin mengatur dan menyelenggarakan kepentingan bersama: yaitu menguntungkan dan menterpadukan kepentingan segenap warga, sekaligus menjauhkan ikhtiar-ikhtiar yang merugikan atau mengorbankan sesama warga.

Secara demikian diupayakan supaya kebijakán negara dan penghayatan warganya dimudahkan dalam mengembangkan kesadaran menanggung tugas maupun beban pembangunan secara bersama-sama dan sejauh mungkin secara proporsional. Di samping itu, negara dan warga-warganya didorong semakin bersikap realistis, supaya dalam menuntut hak-haknya dari pembangunan tidak saling merugikan atau mempertentangkan, melainkan justru berlaku adil dan sosial demi memungkinkan kerjasama maupun kreativitas lebih lanjut. Apabila penataan dan pengarahan ini sama sekali tidak terlaksana, niscaya solidaritas menjadi cita-cita kosong belaka, yang akibatnya per-

satuan dan kebersamaan sesama warga negara hanya bersifat formal dan mudah digoyahkan.

Tidak dihidupkannya semangat solidaritas dalam pembangunan negara akan terlihat dari kenyataan masyarakat yang mencerminkan kesenjangan sosial amat menyolok antara lapisan warga negara yang berpendapatan tinggi dibanding lapisan warga negara yang berpendapatan rendah, atau juga tampak dari perbedaan yang sangat besar antara kelompok warga negara yang mengalami kemajuan peradaban dibanding kelompok warga negara yang masih terkebelakang. Dalam hal ini justru solidaritas bisa ditumbuhkan, jikalau negara mengupayakan kebijakan pembangunannya untuk mendayagunakan kemampuan masyarakat yang sudah sejahtera dan beradab itu demi membangkitkan swadaya masyarakat yang masih melarat dan terkebelakang.

Mengapa demikian adalah karena dalam proses sosial yang berkembang terus, pastilah kesenjangan kesejahteraan dan perbedaan kemajuan cenderung semakin meningkat, sehingga makin sulit kesejahteraan dan kemajuan itu bisa terkejar atau didekati. Untuk itu perkembangan dari kelompok masyarakat yang sejahtera dan beradab yang bagaimanapun hampir pasti berlangsung, dapat didayagunakan oleh pembangunan nasional untuk kebijakan menggerakkan dan menggalakkan berkembangnya swadaya masyarakat yang masih melarat dan terkebelakang. Secara ini bagian-bagian warga negara dalam bermasyarakat tidak dipisahkan atau dilawankan, melainkan dipadukan bekerjasama sebagai rekan pembangunan yang sama-sama berkepentingan akan sukses pembangunan bersama.

Mengingat solidaritas dimaksudkan untuk mempersatukan para warga yang adalah manusia bermartabat pribadi, maka penerapannya wajib mengakui keunikan setiap orang/kelompok dan bukan menyeragamkannya. Warga-warga itu sebagai pribadi mempunyai kebebasan dan mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Demi perluasan tanggung jawab di antara warga negara untuk mencapai tujuan bersama, pastilah kebebasan tidak boleh dilumpuhkan melainkan harus dimungkinkan berkembang menjadi swadaya dan kreativitas pribadi atau kelompok. Maka asas solidaritas mengandaikan asas subsidiaritas, yang bermaksud membukakan ruang untuk pelaksanaan kebebasan pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab bagi lingkungan sosialnya.

Istilah "subsidiaritas" berasal dari kata Latin "subsidiere" yang berarti melindungi dan membantu sejauh diperlukan. Subsidiaritas sebagai asas moral secara negatif menetapkan agar satuan sosial yang lebih besar *jangan mengambil alih* apa yang dapat dilaksanakan oleh anggotanya, yaitu para



warga atau satuan sosial yang lebih kecil. Sementara itu subsidiaritas secara positif mengamanatkan agar satuan sosial yang lebih besar *justru membantu* anggotanya: para warga atau satuan sosial yang lebih kecil sedemikian, sehingga mereka ini mampu menolong dirinya sendiri dan semakin mampu melaksanakan fungsinya atas usaha sendiri (tanggung jawabnya). Ini berarti bahwa bantuan haruslah dihentikan bila sudah tidak diperlukan lagi (subsidiaritas negatif).

Corak bantuan itu untuk memungkinkan menolong dirinya sendiri atau bersifat mendidik dan bukan memanjakan maupun mendikte. Adapun pendidikan yang baik jelas bukan bersifat mengambil alih tugas murid, melainkan bermakna *menggugah swadaya* dan merangsangnya agar semakin bergiat sesuai dengan kemampuannya. Walaupun suatu badan yang lebih besar dapat menyelesaikan urusan lebih efektif dan efisien, namun efektivitas dan efisiensi ini tidak berarti bila anggotanya (para warga dan badan yang lebih kecil) tidak dimungkinkan mengembangkan diri. Maka asas subsidiaritas mengusahakan *desentralisasi* kemampuan pembangunan dan bukan sentralisasi.

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terbunuh pada tahun 1865, telah merumuskan gagasan subsidiaritas dengan tepat sekali: "Bidang-bidang yang syah dari kegiatan pemerintah adalah mengerjakan bagi kehidupan rakyatnya apa saja, yang rakyat dan organisasinya butuhkan tetapi tidak dapat mengerjakannya sama sekali, atau jika mengerjakan hanya dengan kemampuan mereka sendiri saja tidaklah sebaik hasil pekerjaan pemerintah. Tetapi dalam semua bidang yang rakyat secara individual dapat melaksanakan untuk diri mereka sendiri, maka pemerintah seharusnya tidak mencampuri."<sup>1</sup>

Pembangunan negara akan menyelenggarakan hidup bermasyarakat yang semakin manusiawi, apabila mengembangkan warga negaranya dan berbagai organisasinya sehingga mampu berusaha atas swadaya, inisiatif, atau kreasi sendiri dan tidak menyerahkan atau menggantungkan segala sesuatu pada atasan. Maka kesungguhan melaksanakan asas subsidiaritas memang diukur dari sejauh mana pembangunan sudah melancarkan kebijakan yang menggerakkan dan menggalakkan kegiatan segenap warga negara dan organisasinya untuk bertanggung jawab mengembangkan dirinya dan lingkungan sosial yang seluas-luasnya.

## TOLERANSI DAN DIALOG MENGHORMATI MARTABAT MANUSIA

Asas subsidiaritas yang menghormati keunikan dan kebebasan para warga atau organisasi-organisasi, memungkinkan berkembangnya pluralitas atau

<sup>1</sup>Cipta Loka Caraka, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, jilid 4, Jakarta 1984.



kemajemukan perhatian, pemikiran, cita-cita, cara-cara, dan pelaksanaan dalam hal kemajuan ataupun kesejahteraan umum yang ditujui bersama. Sudah pasti pluralitas ini jangan sampai membahayakan kelangsungan solidaritas warga negara pada umumnya dalam memperjuangkan tujuan negara. Maka pelaksanaan asas subsidiaritas dan solidaritas mempersyaratkan asas moral sosial lainnya, yaitu toleransi dan dialog. Toleransi dan dialog mampu mengembangkan solidaritas dan subsidiaritas efektif membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Istilah "dialog" berasal dari perkataan Yunani "dialogos" yang berarti berbicara satu sama lain dan bertukar pikiran. Dialog dapat berlangsung antara dua atau beberapa orang atau antar kelompok dalam negara. Sedangkan istilah "toleransi" berasal dari perkataan Latin "tolerare" yang berarti menahan diri, membiarkan orang berbeda pendapat, berhati lapang terhadap orang yang berpandangan lain.

Dengan berdialog maka partner-partner bisa saling mengenal dan mengembangkan pemikiran, di mana tanpa pengenalan mudah timbul kecurigaan dan kesempitan berpikir memudahkan salah paham. Sementara itu, dalam semangat toleransi diciptakan suasana bebas mencari kebenaran yang dapat diyakini secara rasional. Asas toleransi dan dialog akan mengusahakan agar perwujudan kebebasan bersama dalam berbagai perbedaannya sejauh mungkin mengarah kepada kesejahteraan bersama, atau setidaknya-tidaknya setiap perbedaan tidak meruncing menjadi pertentangan yang merusak persatuan. Melalui toleransi dan dialog yang terus-menerus masing-masing warga dibimbing dan semakin dibukakan kepada nilai dan kebenaran demi pembangunan kesejahteraan bersama.

Pentingnya toleransi dan dialog itu dituntut oleh kenyataan bahwa budi insani (mind) setiap orang sewajarnya membuka diri kepada dunia kenyataan. Dalam hal ini kebenaran dan nilai tak dapat dipaksakan dari luar, sebab orang baru mau mengikatkan diri kalau mengerti dan menyetujuinya sendiri secara batin. Kebenaran dan nilai baru akan berarti sebagai norma yang wajib, sejauh itu disadari oleh orangnya sendiri. Untuk itu keterbukaan para warga jelas harus berkembang dari *dalam kepribadian*. Dalam semangat toleransi dan dialoglah setiap warga dimungkinkan untuk mendalami, memilih, serta mengolah nilai dan kebenaran demi pembangunan kesejahteraan bersama. Karenanya asas toleransi dan dialog sangat diperlukan, sebab penerimaan atau penemuan kebenaran dan nilai tak mungkin dipandang lepas dari proses batiniah itu.

Seringkali kelompok yang sedang berkuasa (pemerintah atau agama) mengemukakan diri sebagai *instansi yang de iure berhak* memberi tafsiran ten-

tang arti dan nilai hidup yang resmi sebagai "kebenaran." Lalu ditetapkan secara dogmatis bahwa hanya kebenaran ini yang diberi hak hidup dan seluruh warga negara diwajibkan tunduk kepada tafsiran kebenaran ini. Terhadap ideologi demikian harus dijawab, bahwa sumber hak itu bukan kebenaran melainkan manusia, di mana bukan manusia untuk kebenaran melainkan kebenaran untuk manusia. Selain itu *harus dibedakan* antara kebenaran subyektif dan kebenaran obyektif. Bukan kebenaran subyektiflah yang patut menjadi norma bagi kita semua, melainkan kebenaran obyektif yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebab apa pun tidak dapat ditentukan semau-maunya secara subyektif sebagai kebenaran, melainkan segala sesuatu perlu dipertanggungjawabkan bersama-sama seobyektif mungkin sebagai kebenaran secara rasional.

Maka dalam suasana dialoglah para warga berkesempatan memeriksa pandangan dan keyakinan mereka mengenai dasar atau motivasinya. Dengan ini mereka dapat membersihkan pandangan dan keyakinan pribadinya dari unsur subyektif, seperti pamrih dan prasangka irasional. Demikian pula dialog dengan orang atau kelompok yang berbeda pendapat maupun keyakinan sangat berguna untuk meluaskan dan memperdalam pandangan, supaya tidak tertutup pada kesempatan satu sudut pandangan saja tetapi justru bisa saling melengkapi. Kecuali mampu mengakrabkan para warga, maka semangat dialog membuat kehidupan bersama memiliki keterbukaan dan kepekaan rasional pada penyadaran kebenaran yang semakin obyektif.

Bagaimanapun pribadi insani baru mengakui sebagai kebenaran ialah apa yang sungguh-sungguh tampak sebagai meyakinkan dan menormakan pikirannya. Suatu pandangan yang melawan keyakinan mendalam seseorang jelas tak mungkin diakuiinya sebagai kebenaran yang normatif. Pribadi tak dapat memberikan persetujuan batin, jika pandangan itu belum tampil sebagai norma yang mengikat hati nuraninya. Penerimaan keyakinan tidak dapat tercapai, bila tanpa partisipasi aktif pribadi itu secara rasional. Maka pemaksaan pandangan hidup atau pelanggaran toleransi adalah melanggar semangat hormat terhadap sesama warga sebagai pribadi, karena mengabaikan kebasannya (aktivitas rasionalnya) dan ini akan mengganggu kesejahteraan serta solidaritas dari pihak yang dipaksa.

Oleh sebab itu, orang yang mungkin dianggap berkelainan keyakinan perlu dihormati dan diberi hak untuk mengatur hidupnya sesuai dengan keyakinannya secara yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena kebahagiaan atau kesejahteraan pribadi itu bersifat personal, yaitu tercapai di dalam hati, maka tidak dapat terwujud tanpa partisipasi aktif orangnya sendiri. Negara dalam hal ini pemerintah, tidak berhak main paksa agar pribadi-pribadi warganya tunduk saja, menerima tanpa kritis kebenaran resmi yang ditetapkan. Peme-

rintah hanya berkewajiban menyiapkan persyaratan kondisional, supaya warganya semakin dimudahkan berkembang dalam keterbukaan dan kepekaan akan nilai dan kebenaran obyektif melalui dialog dan toleransi. Negara khususnya bertugas untuk menjamin kepribadian warga-warganya, supaya mereka dapat hidup seturut dengan keyakinannya masing-masing secara saling menghormati.

Asas toleransi dan dialog ini baru akan memadai, jika tidak hanya berlangsung di antara kelompok masyarakat yang kurang lebih setaraf melainkan juga mencakup antara lapisan masyarakat yang sudah maju dan sejahtera terhadap lapisan masyarakat yang masih terkebelakang dan menderita. Toleransi dan dialog yang terakhir ini sebenarnya justru yang masih sangat perlu dirintis dan digalakkan. Tanpa berlangsungnya dialog ini berarti pemberantasan penderitaan sosial pada bangsa kita hanya menyangkut lapisan luar belaka dan belum mengena pada dasar masalahnya. Sedangkan tanpa dialog dan toleransi ini juga, maka ketakpedulian atau kesewenang-wenangan lapisan masyarakat yang maju dan sejahtera akan bersambut dengan kedengikan atau keresahan dari lapisan masyarakat yang terkebelakang dan menderita:

Implikasi vital dari asas dialog dan toleransi adalah bahwa kita *tidak mungkin bersikap toleran* terhadap kekerasan dan paksaan yang melanggar hak manusia untuk hidup menurut keyakinannya. Atas nama toleransi sendiri kita secara moral berkewajiban untuk melawan setiap propaganda yang menyebarkan ideologi yang tak menghormati kebebasan pribadi. Ideologi demikian secara hakiki mematikan dialog dan hanya mengenal monolog saja, yang pada dasarnya memiskinkan perkembangan masyarakat dan menyeragamkan kepribadian warganya dalam kekerdilan.

## KESIMPULAN: DIPERDALAMKAN OLEH IDEOLOGI PANCASILA

Dengan kepribadiannya masing-masing saja setiap manusia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi untuk mencapai cita-cita hidupnya. Sebaliknya, secara bersama-sama pribadi-pribadi merasa lebih kuat dan berdaya mampu membuahkan hasil karya yang jauh melebihi daripada jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Maka memang wajarlah bila manusia membudayakan kehidupan sosial yaitu hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun masyarakat dan negara ini dimaksudkan untuk kepentingan bersama warga-warganya, yaitu mengembangkan taraf hidup segenap warganya, atau dengan kata lain senantiasa meningkatkan martabat kemanusiaan mereka. Ini jelas mempersyaratkan strategi sosial berupa perilaku bersama dari seluruh warganya untuk pembangunannya.



Pembangunannya bersama rupanya mengamanatkan asas solidaritas, subsidiaritas, toleransi, dan dialog di mana asas moral sosial ini mengarahkan kegiatan bersama menuju perkembangan sosial yang manusiawi. Solidaritas mengikat kebebasan anggotanya menjadi *kerjasama mencapai tujuan bersama*. Solidaritas moral membentuk persatuan warga yang lebih kuat, agar kesejahteraan bersama dapat tercapai. Subsidiaritas negatif dan positif membuat kerjasama itu menjadi *partisipasi dan kebersamaan manusiawi*. Subsidiaritas menekankan supaya swadaya dan tanggung jawab pribadi atau organisasi merupakan bagian integral untuk kesejahteraan bersama. Sementara itu, dialog dan toleransi akan melancarkan kerjasama maupun *menggiatkan daya-daya batin*: cipta, rasa, dan karsa secara individual ataupun sosial menuju cita-cita bersama.

Bagi bangsa Indonesia kepentingan bersama, kesejahteraan bersama, dan cita-cita bersama itu adalah masyarakat Pancasila. Dalam cakrawala perwujudan nilai-nilai Pancasila niscaya martabat kemanusiaan seluruh warga negara dihormati secara mendasar dan mencakup. Solidaritas diwujudkan ke arah keadilan sosial dan cinta/persatuan bangsa. Subsidiaritas negatif dan positif diperdalamkan menuju kemanusiaan yang adil dan beradab maupun kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan toleransi dan dialog mengejawantah dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka bila di masyarakat kita ideologi Pancasila sungguh dihayati dan diamalkan, jelas asas moral yang mengkondisikan hormat atas martabat manusia itu mendapatkan wujud keluhurannya secara tuntas mendalam.

Sebaliknya jika semangat solidaritas, subsidiaritas, dialog, dan toleransi hampir tidak berkembang, maka berbagai pembicaraan mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila hanya akan menjadi sekedar *mitos* ataupun *topeng* untuk macam-macam kepentingan egoistis. Dengan demikian, pelaksanaan solidaritas, subsidiaritas, toleransi, dan dialog -- sebagai asas moral yang mengembangkan pembangunan kehidupan bersama yang maju dan sejahtera -- merupakan *langkah berarti* untuk pengamalan Pancasila sebagai asas moral yang lebih mendalam bagi perwujudan hormat atas kemanusiaan warga negara. Kegairahan melaksanakan asas pembangunan kemajuan dan kesejahteraan yang lebih dangkal ini menjadi batu uji bagi kesungguhan untuk melaksanakan asas kemajuan dan kesejahteraan yang lebih mendalam.

Sudah barang tentu perwujudan ini semua sangat tergantung pada peranan pemerintah yang disertai kekuasaan sah untuk mengupayakan hidup bermasyarakat dan bernegara agar senantiasa meningkatkan martabat kemanusiaan warganya. Upaya pemerintah ini akan tercermin dari adakah *teladan mereka sendiri* dalam melaksanakan solidaritas, subsidiaritas, toleransi, dan



dialog. Karena asas moral ini dimaksudkan untuk membangun masyarakat kenegaraan, maka perlu mengejawantah dalam bentuk tertib hukum. Dengan menjadi tertib hukum, maka asas moral yang berupa ajakan memperoleh *daya kekuatan pelaksanaan* sebab pelanggarannya dapat dituntut hukuman. Secara demikian pemerintah berperanan besar untuk menjabarkan asas moral itu ke dalam tata hukum atau kebijakan dan menjamin penegakannya. Meluasnya pelanggaran hukum dan ketiadaan kebijakan akan membuat kaidah-kaidah moral bagaimanapun bagusya tidak begitu berarti.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Benn, S.I., and Peters, R.S., *The Principles of Political Thought*, New York: The Free Press, 1965.
- Downie, R.S., *Roles and Values*, London: Methuen & Co. Ltd., 1970.
- Iver, R.M. Mac, *The Web of Government*, New York: The Macmillan, 1951.
- Kranenburg, R., *Ilmu Negara Umum*, terjemahan oleh T.B. Sabaroedin, Jakarta: J.B. Wolters, 1957.
- Mabbot, J.D., *The State and The Citizen*, London: Hutchinson & Co. Ltd., 1967.
- Paassen, C. van SCY, *Filsafat Sosial*, Yogyakarta: Institut Filsafat Teologi, 1974.
- Subagya, Rahmat, *Pantja Sila Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Basis, 1955.